



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Jl. Soekarno Hatta No.714, Babakan Penghulu, Cinambo  
Kota Bandung, Jawa Barat 40295, [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id), [surat@pta-bandung.go.id](mailto:surat@pta-bandung.go.id)

---

Nomor : 1646/KPTA.W10-A/HM2.1.4/XII/2024 Bandung, 31 Desember 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian LHKPN dan SPT Tahun 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Barat  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

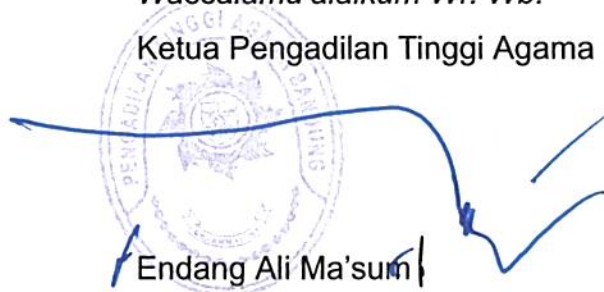
1. Kepada Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja pengadilan tingkat pertama wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui : <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice> dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2024 melalui link : <https://djponline.pajak.go.id/account/login>;
2. Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) selain tersebut pada poin 1 diatas, wajib mengisi Laporan SPT Tahun 2024 melalui link <https://djponline.pajak.go.id/account/login>;
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas Laporan LHKPN dan SPT Tahun 2024 dilaporkan paling lambat pada **tanggal 31 Januari 2025** dan bukti laporan tersebut agar di upload oleh masing-masing pegawai ke aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI;

4. Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI [http://siwas.mahkamahagung.go.id.](http://siwas.mahkamahagung.go.id;);

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung



Endang Ali Ma'sum

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.